

Irmawan Dorong Dirjen Hubla Bangun Pelabuhan Teluk Surin di Abdy

Category: Nasional

written by Maulya | 05/07/2023



Orinews.id | Jakarta – Anggota DPR RI asal Aceh 1 Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) H. Irmawan, S.Sos, MM meminta Dirjen kelautan (Hubla) untuk memperbesar anggaran kelautan di Aceh pada tahun 2024, karena dari sekian banyak anggaran kelautan, Aceh mendapat sedikit sekali.

“Kalau saya tidak salah hanya ada pembangunan kantor navigasi, padahal di Aceh ada beberapa pelabuhan yang perlu diperhatikan, agar bisa kegunaannya maksimal,” kata Irmawan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi V DPR RI dengan Dirjen Hubla, DJKA, Kepala BPTJ dan Kepala BPSDM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Irmawan menyebut pelabuhan Krueng Raya, Aceh Besar, yang pernah menjadi kebanggaan dan pusat perekonomian rakyat Aceh, namun saat ini perlu perhatian untuk renovasi dan perbaikannya.

“Saya berharap Dirjen Kelautan agar tahun 2024 dapat mengalokasikan anggaran ke pelabuhan Malahayati ini, agar Rakyat Aceh bisa mendapatkan keadilan dari Dirjen Kelautan,” kata Irmawan.

Irmawan juga mendorong Dirjen kelautan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pelabuhan Teluk Surin di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mobilisasi JPO (*Crude Palm Oil*), karena saat ini kawasan Pantai Barat Selatan adalah daerah penghasil sawit yang banyak.

“Mobilisasi ke Medan selama ini menggunakan truk tangki JPO yang sangat mengganggu jalan raya di pantai Barat Selatan, selain aktifitas truk juga berkontribusi terhadap kerusakan jalan nasional,” jelas Irmawan.

Untuk itu—lanjut Irmawan—harus ada pemikiran bersama bahwa di Pantai Barat Selatan dibutuhkan pelabuhan yang dapat mengangkut JPO dari Barat Selatan ke Medan, tanpa menggunakan truk tangki lagi yang sangat merusak jalan di Pantai Barat selatan ini.

Sementara, Selasa (4/7/2023) kemarin, Irmawan juga mendorong Dirjen Bina Marga untuk memasukkan ruas Jalan Keumala-Jantho menjadi prioritas. Alasannya, ruas jalan tersebut sudah pernah dianggarkan pada 2019. Bahkan sudah ada pemenang tender, namun batal dilaksanakan karena ada *refocussing*.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Aceh ini juga mendorong Kementerian PUPR melalui Cipta Karya untuk memprioritaskan anggaran pembangunan Simpang Ulee Kareng Banda Aceh dan penambahan anggaran untuk infrastruktur di Aceh.[]